



Munich Personal RePEc Archive

The Role of National Education System in Developing the Cultural Values

Tongam Sihol Nababan

University of HKBP Nommensen

August 2009

Online at <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/49241/>

MPRA Paper No. 49241, posted 22. August 2013 05:39 UTC

PERANAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI BUDAYA *)

Oleh :

Dr. T. Sihol Nababan, SE., MSi.

(Fakultas Ekonomi – Universitas HKBP Nommensen, Medan)

Abstract

National Education System is always influenced by some social dynamics. One of them is cultural values which need to be developed. The development of cultural values aims to support the national identity and national cultures. Therefore, national education is hoped to develop the national cultures by civilizing them to the students and schooling should play the role to civilize the culture values. The existence of value crisis is caused by the poor education as a process of civilizing.

I. PENDAHULUAN

Salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia adalah pendidikan. Bahkan variabel pendidikan digunakan untuk menghitung *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut *Human Development Report 2007 – 2008*, HDI Indonesia sebesar 0,728, yang berada pada peringkat 107 dari 177 negara yang disurvei oleh UNDP. Bila dirinci, HDI tersebut merupakan gabungan dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks GDP berdasarkan PPP (*Purchasing Power Parity*). Indeks GDP Indonesia mencapai 0,600. Angka harapan hidup orang Indonesia mencapai 69,7 tahun, atau dinyatakan dalam indeks harapan hidup mencapai 0,745. Indeks pendidikan mencapai 0,83 karena angka melek huruf sebesar 90,40 % dan rata-rata rasio masuk sekolah dari SD sampai SMU mencapai 68,20%. Dengan kata lain, belum seluruh rakyat Indonesia “merdeka dari kebodohan”. Dengan rekor pembangunan manusia seperti itu Indonesia sudah tertinggal jauh disbanding negara-negara tetangga. Peringkat negara-negara ASEAN masing-masing adalah 105 untuk Vietnam, 90 Philipina, 78 Thailand, yang bersama Indonesia masuk dalam kategori *medium human development*, rekor pembangunan manusia kelas menengah. Negara Malaysia, Brunei, Singapura sudah mencapai Negara dengan pembangunan manusia kategori tinggi karena masing-masing mencapai peringkat ke -63, 30, dan 25 (UNDP, 2008).

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Indonesia ternyata belum baik sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan yang berarti antara penyelenggaraan pendidikan dengan kualitas pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang dihasilkan selama ini, meskipun masih ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhinya. Oleh karena itu pembangunan pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pembangunan pendidikan nasional telah mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*) dan *Millenium*

*) Makalah ini disampaikan pada *The 1st International Symposium on Education 2009* di USU Medan tanggal 15 Agustus 2009.

Development Goals (MDGs) serta *World Summit on Sustainable Development* yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta peningkatan keadilan sosial.

Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional berjalan seiring dengan berkembangnya dinamika sosial. Perkembangan dinamika sosial sebagai bentuk aksi-reaksi masyarakat terhadap keberlangsungan berbagai bidang kehidupan (politik, ekonomi, sosial-budaya, bahkan ideologi) ditengah-tengah mereka juga turut mempengaruhi dinamika pendidikan, karena berbagai bidang kehidupan tersebut realitasnya merupakan subsistem yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam suasana dinamis tersebut pengembangan kebudayaan melalui penggalian nilai-nilai budaya sangat diharapkan yang dapat memberikan arah bagi revitalisasi sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Disamping itu diupayakan pula pembangunan moral bangsa yang mengedepankan disiplin, kemandirian, dan etos kerja.

Tulisan ini mencoba menguraikan betapa pentingnya mengembangkan nilai-nilai budaya dan etos kerja dengan menggali nilai-nilai kearifan lokal, sehingga mampu menangkal penetrasi budaya asing melalui modernisasi pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat jati diri bangsa (identitas nasional) melalui pengembangan ilmu pengetahuan serta mengaktualisasikan nilai-nilai budaya yang sudah melekat pada kultur masyarakat Indonesia selama ini.

II. KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN

Pewarisan kebudayaan dapat dilakukan dengan sarana pendidikan, baik formal maupun nonformal. Agar tradisi kebudayaan tetap hidup dan berkembang setiap masyarakat dapat mewariskannya kepada generasi yang lebih muda melalui pendidikan. Namun dalam konteks kebudayaan banyak orang mempertanyakan pendidikan kita. Mengapa sistem pendidikan tidak memperkuat dan mengembangkan budaya sendiri? Mengapa bangsa kita mudah terpengaruh oleh budaya asing? Mengapa budaya asli kita tidak dapat menahan intervensi globalisasi yang datang? Apakah pendidikan kita selama ini sudah dapat dijadikan sebagai sarana pewarisan budaya atau tidak?

Pertanyaan-pertanyaan ini menggambarkan kegelisahan tentang bagaimana sebenarnya pendidikan berperan. Pendidikan yang selama ini diharapkan sebagai upaya pembentukan perilaku/proses pembudayaan dan penanaman nilai-nilai kultur, ternyata belum berhasil membawa peserta didik untuk mengembangkan sikap dan kebudayaan sendiri, justru mereka terperangkap dalam kontak budaya (*cultural contact*) dengan budaya asing yang belum tentu memiliki nilai yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu nilai-nilai yang selama ini melekat dalam masyarakat (kearifan lokal) perlu dikembangkan melalui pendidikan nasional, karena secara tidak langsung dalam proses pembelajaran (pendidikan) di sekolah telah terjadi proses pembudayaan kepada peserta didik.

Kebudayaan dan Nilai-nilai Budaya

E. B. Taylor (1871) dalam bukunya *Primitive Culture* mendefenisikan **kebudayaan** sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Secara lebih terperinci, Kuntjaraningrat (1974) membagi kebudayaan menjadi unsur-unsur yang

terdiri dari sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian serta sistem teknologi dan peralatan. Sedangkan menurut Ashley Montagu (1961), suatu kebudayaan akan mencerminkan tanggapan manusia terhadap kebutuhan dasar hidupnya. Karena dengan kebutuhan hidup inilah yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Suriasumantri, 1999).

Berdasarkan pengertian *kebudayaan* tersebut di atas, maka muncul pertanyaan yang perlu dikaji untuk menyemangati pembangunan masyarakat dalam konteks nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, yaitu : "Nilai-nilai budaya apa yang dapat dipakai atau memberi nilai-nilai positif untuk pembangunan masyarakat ?"

Kebudayaan merupakan sebuah konsep yang menyatu dalam kehidupan manusia dan merupakan seperangkat sistem pengetahuan atau system gagasan yang berfungsi menjadi *blue print* bagi sikap dan perilaku manusia sebagai anggota atau warga dari kesatuan sosialnya, tumbuh, berkembang dan berubah sesuai dengan kebutuhan hidup manusia (Sairin, et al, 2002). Paul DiMaggio (1994) menyatakan bahwa aspek budaya terdiri dari 2 bentuk, yaitu : 1) budaya yang bersifat *konstitutif* (berupa kategori-kategori, skrip/naskah, konsepsi tentang agen, gagasan), 2) budaya yang bersifat *regulatif* (berupa norma, nilai, rutinitas). Misalnya, budaya dapat mempengaruhi perilaku ekonomi dengan pengaruh bagaimana pelaku-pelaku (*actor*) mendefinisikan kepentingannya, termasuk aspek konstitutif, dan jika dengan hambatan ada pada usaha mereka terhadap kepentingan mereka, termasuk aspek regulatif (Damsar, 2002).

Nilai-nilai budaya adalah jiwa dari kebudayaan dan menjadi dasar dari segenap wujud kebudayaan dalam bentuk tata hidup yang merupakan kegiatan manusia. Tata hidup merupakan pencerminan yang kongkret dari nilai budaya yang bersifat abstrak, yaitu : 1) kegiatan manusia dapat ditangkap oleh panca indera sedangkan nilai budaya hanya tertangguk oleh budi manusia, 2) nilai budaya dan tata hidup manusia ditopang oleh perwujudan kebudayaan, 3) sarana kebudayaan yang bersifat fisik yang merupakan produk dari kebudayaan atau alat yang memberikan kemudahan dalam berkehidupan.

Menurut Usman (2003) komponen-komponen budaya terdiri dari : 1) pranata sosial atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tumbuh di kalangan masyarakat, 2) adat istiadat dan pola kebiasaan yang berlaku, 3) proses sosial (kerjasama, akomodasi, konflik) di kalangan masyarakat, 4) akulturasi, asimilasi dan integrasi dari berbagai kelompok masyarakat, 5) kelompok-kelompok dan organisasi sosial, 6) pelapisan (*strata*) sosial di kalangan masyarakat, 6) perubahan sosial yang tengah berlangsung di tengah masyarakat, serta 7) sikap dan persepsi masyarakat terhadap program dan kegiatan.

Sebagaimana diuraikan di atas nilai-nilai budaya adalah merupakan dasar bagi tata kehidupan masyarakat. Artinya, dalam aspek kehidupan apapun, maka nilai-nilai budaya merupakan acuan untuk bertindak.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 – 2009 dinyatakan bahwa pengembangan nilai budaya bertujuan untuk memperkuat jati diri bangsa (*identitas nasional*) dan memantapkan budaya nasional. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui upaya memperkuat ketahanan budaya nasional sehingga mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negative dan produktif. Kemudian diupayakan pembangunan moral bangsa yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, gotong-royong, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu dan tanggungjawab. Tujuan tersebut dilaksanakan pula melalui pengarusutamaan nilai-nilai budaya pada setiap aspek pembangunan.

Pendidikan

Salah satu unsur dari kebudayaan itu adalah *ilmu pengetahuan*. Menurut Suriasumantri (1999), *ilmu* dapat dipandang sebagai *produk*, *proses* dan *paradigma etika*. Sebagai produk, ilmu merupakan hasil dari kegiatan sosial yang berusaha memahami alam, manusia dan perilakunya baik secara individu atau kelompok. Apa yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini, merupakan hasil penalaran (*rasio*) secara objektif. Ilmu sebagai proses, berarti ilmu diperoleh dari hasil metode keilmuan yang diakui secara umum dan universal sifatnya. Oleh karena itu ilmu dapat diuji kebenarannya, sehingga tidak mustahil suatu teori yang sudah mapan dapat ditumbangkan oleh teori lain. Ilmu sebagai paradigma etika, karena ilmu selain universal, komunal, juga alat meyakinkan sekaligus skeptis, tidak begitu saja mudah menerima kebenaran (Soelaeman, 2001).

Ilmu pengetahuan diperoleh melalui *pendidikan*. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), Pasal 1, mendefinisikan bahwa : "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara".

Kemudian, Pasal 3 menyebutkan bahwa *fungsi* dan *tujuan pendidikan* adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Dalam konteks pembangunan masyarakat (*community development*) Leagans (2000) mengatakan bahwa pendidikan (*education*) itu sebagai *alat* untuk melakukan perubahan dalam kehidupan manusia dalam 4 bidang, yaitu :

1. *Changes in what people know – their knowledge of themselves, of their society and of their physical environment.*
2. *Changes in what people can do – their skills, mental and physical.*
3. *Changes in what people think and feel – their attitude toward themselves, toward their society and toward their physical environment.*
4. *Changes in what people actually do – their actions related to factors determining their own welfare".*

Lebih lanjut, Leagans memberikan definisi dan fungsi pendidikan, sebagai berikut :

"Defined simply, education in any form is the production of changes in human behaviour – changes in what people know, in what they think, in what they can do and what they actually do. Viewed broadly, education is the most potent force yet discovered for moulding a free society into the desired form. It is the most basic means available in a society for promoting things 'good' or things 'bad'. Guiding it properly and making it effective, therefore, is a high-level responsibility and a vastly complex undertaking. All modern societies place education at the top, or near top, in their value system as a means of promoting progress by the people".

Berdasarkan uraian-uraian di atas, baik yang diberikan oleh Undang-Undang SisdiKNAS maupun oleh Leagans, dapat disimpulkan bahwa pendidikan dalam masyarakat adalah sebagai alat untuk : mengembangkan potensi diri masyarakat, mencerdaskan bangsa, serta merubah sikap untuk memperoleh kemajuan. Bahkan pendidikan harus ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi sebagai alat untuk memperoleh kemajuan.

III. HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN

Hubungan antara pendidikan dan kebudayaan digambarkan sebagai hubungan *ontologis* dan *epistemologis*. Dalam konteks semakin menguatnya dan timbulnya etno-nasionalisme, maka hubungan antara pendidikan dan kebudayaan semakin menonjol. Sedangkan di dalam prakteknya, ada berbagai berbagai model pendidikan untuk kesadaran dan pengembangan kohesi sosial, yaitu pendidikan *multi-kultural*, pendidikan *trans-kultural*, dan pendidikan *inter-kultural*. Tujuan model pendidikan ini adalah untuk pengembangan sikap toleransi dalam masyarakat (Tilaar, 2002).

Pendidikan *inter-kultural* ditekankan kepada eksistensi budaya-budaya atau sub-budaya yang ada. Dalam rangka pengembangan kohesi sosial maka yang diperlukan ialah kegiatan interaksi budaya. Bentuk yang lain ialah *trans-kultural* yang mencari bentuk-bentuk *universalitas* dari budaya-budaya yang ada. Model *trans-kultural* ini barangkali yang telah kita gunakan di dalam praksis pendidikan selama Orde Baru.

Model yang tepat bagi masyarakat Indonesia saat ini yang sedang berada dalam masa otonomi daerah ialah pendidikan *multi-kultural*. Artinya masing-masing budaya etnis yang ada di dalam masyarakat mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang. Di dalam pengembangan tersebut tidak ada campur tangan pemerintah, tetapi sepenuhnya menjadi urusan masyarakat itu sendiri sebagai pemilik kebudayaan. Pemerintah hanya menjaga supaya tidak terjadi benturan budaya yang merugikan. Pemerintah mempunyai tugas untuk menjaga perkembangan budaya yang alamiah dan kemungkinan terjadinya akulturasi atau pengembangan budaya. Di dalam model *trans-kultural* ada kemungkinan pemerintah mempunyai keinginan untuk memaksakan adanya unsur-unsur yang universal yang harus dilaksanakan oleh semua budaya etnis. Di dalam model *inter-kultural* yang dipentingkan bukannya perkembangan sub budaya itu sendiri, tetapi bagaimana antar sub-budaya berinteraksi sehingga tidak terjadi ketegangan-ketegangan.

Dalam masyarakat Indonesia pendidikan *multi-kultural* mempunyai berbagai orientasi. Pertama adalah reorientasi visi pendidikan. Dalam kerangka otonomi daerah, visi pendidikan di daerah haruslah tumbuh dan berkembang dalam konteks budaya di mana lembaga pendidikan itu berada. Pengetahuan mengenai budaya lokal bagi para pendidik tentunya merupakan syarat. Orientasi kedua adalah bagaimana peran pendidikan nasional sebagai pengiring kebudayaan nasional dapat dicapai melalui proses kegiatan belajar mengajar di sekolah/lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Sedangkan orientasi ketiga adalah bagaimana kita memperkenalkan kebudayaan nasional kepada peserta didik, baik itu berupa ide (gagasan), sistem sosial masyarakat atau perilaku/moral/akhlak yang baik. Di samping itu, boleh juga kita memperkenalkan budaya asing yang tidak melanggar/menyalahi budaya asli seperti etos kerja, menjaga kebersihan, ketertiban, sikap toleransi dan lain sebagainya.

Dengan demikian diperlukan pembentukan watak, peradaban, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan sebagainya sebagai proses pembudayaan yang dapat dilakukan saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau proses pendidikan.

IV. PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional berjalan dengan penuh dinamika. Hal ini setidaknya dipengaruhi oleh dua hal utama yaitu *political will* dan dinamika sosial. *Political will*

sebagai suatu produk dari eksekutif dan legislatif merupakan berbagai regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan diantaranya tertuang dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 UUD 1945, maupun dalam regulasi derivatnya seperti UU No.2/1989 tentang Sisdiknas yang diamandemen menjadi UU No.20/2003, UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta berbagai rancangan UU dan PP yang kini tengah di persiapkan oleh pemerintah (RUU BHP, RPP Guru, RPP Dosen, RPP Wajib belajar, RPP Pendidikan Dasar dan Menengah, dsb). Kemudian dalam cakupan yang lebih operasional, maka peraturan menteri; peraturan daerah yang dibuat para gubernur, walikota/bupati; serta keseriusan para anggota DPRD juga memiliki andil yang besar untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan nasional dalam lingkup daerah. Adapun berkembangnya dinamika sosial sebagai bentuk aksi-reaksi masyarakat terhadap keberlangsungan berbagai bidang kehidupan (politik, ekonomi, sosial-budaya, bahkan ideologi) ditengah-tengah mereka juga turut mempengaruhi dinamika pendidikan, karena berbagai bidang kehidupan tersebut realitasnya merupakan subsistem yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu sistem yang lebih besar yaitu sistem pemerintahan. Pendidikan merupakan salah satu subsistem yang sentral, sehingga senantiasa perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan dalam menjaga kontinuitas proses kehidupan dalam berbagai aspek di tengah-tengah masyarakat (negara) tersebut (*input-proses-output*). Oleh karena itu, dalam upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional ternyata memerlukan adanya perbaikan pula dalam aspek sistemik (regulasi) serta meningkatnya kontrol sosial dari masyarakat.

V. PENUTUP

Pendidikan nasional merupakan sarana untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah secara tidak langsung terjadi proses pembudayaan nilai-nilai kepada peserta didik. Pembudayaan yang baik akan menghasilkan *output* peserta didik yang baik pula. Kalau kita tanamkan nilai-nilai kebudayaan nasional, misalnya sikap gotong-royong, menanamkan etos kerja dan disiplin maka secara tidak langsung kita telah melestarikan kebudayaan nasional kepada peserta didik.

Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan eksistensial. Kebudayaan dalam pengertian tertentu merupakan proses pendidikan. Tidak ada kebudayaan yang statis tetapi terus-menerus dalam proses perubahan. Oleh karena itu, proses pendidikan tidak dapat direduksi hanya sebagai proses yang terjadi dalam lembaga sekolah, tetapi sekolah sebagai lembaga sosial merupakan bagian dari proses pendidikan sebagai proses pembudayaan.

Lembaga sekolah yang melaksanakan proses pendidikan (*schooling*) merupakan bagian dari proses pendidikan yang lebih luas sebagai proses pembudayaan. Dengan demikian, proses pendidikan hanya dapat diketahui apabila kita menempatkannya dalam lingkungan kebudayaan suatu masyarakat. Dengan kata lain, kita perlu mempunyai suatu gambaran bagaimana proses pendidikan sebagai suatu bagian dari proses pembudayaan tersebut. Atas dasar ini, terjadinya krisis nilai pada peserta didik adalah akibat tidak berhasilnya pendidikan sebagai proses pembudayaan. Dalam konteks ini, proses pendidikan tidak harus dilakukan dalam lingkungan sekolah, tapi juga lingkungan keluarga maupun masyarakat dan teknologi.

DAFTAR BACAAN

- Damsar, Dr., 2002, *Sosiologi Ekonomi*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Handayani, 2008, *Problematisasi Sistem Pendidikan Indonesia dan Gagasan Pendidikan Berbasis Syariah*, [http :/www.syabab.com](http://www.syabab.com). (30 Juli 09).
- Kadiman, Kusmayanto, 2005, *Etos Kerja ... Untuk Siapa ?*, Kementerian Ristek RI.
- Ki Supriyoko, *Pendidikan Nasional Sebagai Pengiring Kebudayaan Nasional*, Kuliah Politik Pendidikan Nasional Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sessi ke-10. [http :/www.syabab.com](http://www.syabab.com). (30 Juli 09).
- Kuncoro, Mudrajad, *Sudabkah Kita Merdeka ?*, Koran Sindo, 18 Agustus 2008.
- Leagans, J.Paul, 2000, *Extension Education For Community Development*, Seminar Paper, New York, USA.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 – 2009*, Penerbit CV. Eka Jaya, Jakarta.
- Soelaeman, M.Munandar, 2001, *Ilmu Sosial Dasar : Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Suriasumantri, Jujun S., 1999, *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Tampubolon, Daulat P., 2001, *Perguruan Tinggi Bermutu ; Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapai Tantangan Abad ke -21*”, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tilaar, H.A.R, 2002, *Perubahan Sosial dan Pendidikan*, Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 (UU No. 20 Tahun 2003)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- UNDP 2008, *Human Development Report 2007 – 2008*, [http :/www.undp.org/](http://www.undp.org/) (25 Juli 09).
- Usman, Sunyoto, Dr., 2003, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.